

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN  
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN  
TRIWULAN I TAHUN 2025  
Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 04 Tahun 2023  
DI PENGADILAN TINGGI GORONTALO**



**Disahkan di Gorontalo  
Pada Hari Kamis 27 Maret 2025**

**Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo**



**Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum**

**Penanggung Jawab Tim Survei**



**Ir. Endro Heryanto, SH, MH.**

**Ketua Tim Survei**



**Masdin Daliuwa, SH.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pelayanan Publik (*Public Service*) oleh Birokrasi merupakan salah satu perwujudan dan fungsi Aparatur Negara sebagai Abdi Masyarakat disamping sebagai Abdi Negara. Pelayanan Publik oleh Birokrasi dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian Pelayanan Publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah diterapkan.

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang digunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah sesuai penyedia layanan semata-mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan Saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga Laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gorontalo, 27 Maret 2025

Tim Survei

## DAFTAR ISI

<b>BAB I KUESIONER SURVEI .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kuesiner Survei .....	1
<b>BAB II METODOLOGI SURVEI .....</b>	<b>3</b>
2.1. Kriteria Responden .....	3
2.2. Metode Penelitian .....	3
2.3. Metode Pengolahan Data dan Analisis .....	4
<b>BAB III PENGOLAHAN SURVEI .....</b>	<b>6</b>
3.1. Analisis Hasil Survei .....	6
3.2. Evaluasi Hasil Survey .....	.11
3.3. Tindak Lanjut Hasil Survei .....	12
<b>BAB IV. ....</b>	<b>13</b>
<b>DATA SURVEI .....</b>	<b>13</b>
4.1. Data Responden .....	13
4.2. Data Dukung Lainnya .....	16

# BAB I

## KUESIONER SURVEI

### 1.1. Kuisisioner Survei

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani , Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023, tentang Pemantau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggaraan pelayanan publik dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang ditetapkan.

Adapun Kuesioner /Daftar Pertanyaan Terkait Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo terdiri dari:

Pertanyaan 1	Apakah Pelayanan oleh Petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Pertanyaan 2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari Petugas untuk meminta imbalan tertentu?
Pertanyaan 3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam Pengurusan surat / berkas perkara?
Pertanyaan 4	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
Pertanyaan 5	Apakah dipengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Pertanyaan 6	Apakah memberikan tanda terima kasih layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
Pertanyaan 7	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (untuk pelayanan yang dipungut biaya/PNBP)
Pertanyaan 8	Apakah Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam Pengurusan Layanan di Pengadilan?
Pertanyaan 9	Apakah pernah melihat atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
Pertanyaan 10	Apakah Pernah Mengurus perkara melalui Hakim / Panitera /staf Pengadilan diluar sidang?

## BAB II METODOLOGI SURVEI

### 2.1. Kriteria Responden

Responden Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dikumpulkan dalam kegiatan ini sesuai dengan jumlah seluruh penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari ASN serta masyarakat yang menggunakan Layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo..

Pada Periode Penelitian ini, Pengadilan tinggi Gorontalo menentukan Jumlah Sample sebanyak 31 (tiga Puluh satu) Responden yang menggunakan layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

### 2.2. Metode Penelitian

untuk penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menggunakan Metode Deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai Variabel Mandiri, Baik satu variable ataupun lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Sebelum melaksanakan survei ada beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan pelaksanaan  
Dilaksanakan sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki.
- Penyiapan bahan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan data. Penyusunan Jadwal.

### 2.3. Metode Pengolahan data Analisis

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi oleh penerima secara layanan melalui aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI). Pengumpulan data dilaksanakan pada Rentang Waktu dari tanggal 01 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025, selanjutnya data diolah by System melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI).

Kegiatan Pengumpulan data Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) diawasi oleh Ketua Team Survei Pelayanan Yaitu **Masdin Daliuwa, S.H.** (Panmud Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo) Ketua Team survei akan mengecek kerja petugas pelaksana dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei Indeks Persepsi anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Adapun Proses Pelaksanaan Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Responden yang telah selesai menerima layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo diarahkan untuk mengisi survei secara elektronik melalui Aplikasi SISUPER BADILUM yang terletak di area PTSP Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan alamat: [http://bit.ly/survey\\_ptgto](http://bit.ly/survey_ptgto)
- Isian data terhadap 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam elektronik kuesioner (e-survey).
- Hasil dari pengisian kuesioner yang dilaksanakan melalui aplikasi SISUPER BADILUM Kemudian dianalisa by Sistem melalui aplikasi SISUPER Badan Peradilan umum Mahkamah Agung RI.
- Data Pendapat Responden yang terisi dalam kuesioner online kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Setelah data terkumpul pada penelitian ini disusun dalam bentuk diagram frekuensi dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif.

Kesepuluh ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dalam 10 item, dengan 4 opsi jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai 4.

Adapun Ruang lingkup Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagaimana table 1 dibawah ini

**Tabel 1**  
**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi**

No.	UNSUR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Prosedur	4,00
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
3	Menjual Pengaruh	4,00
4	Transaksi Biaya	4,00
5	Biaya Tambahan	4,00
6	Hadiah	4,00
7	Transparansi Pembayaran	4,00
8	Percaloan	4,00
9	Perbuatan Curang	4,00
10	Transaksi Rahasia	4,00

**Tabel 2**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25-43,75	1	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	2	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	4	Sangat Baik

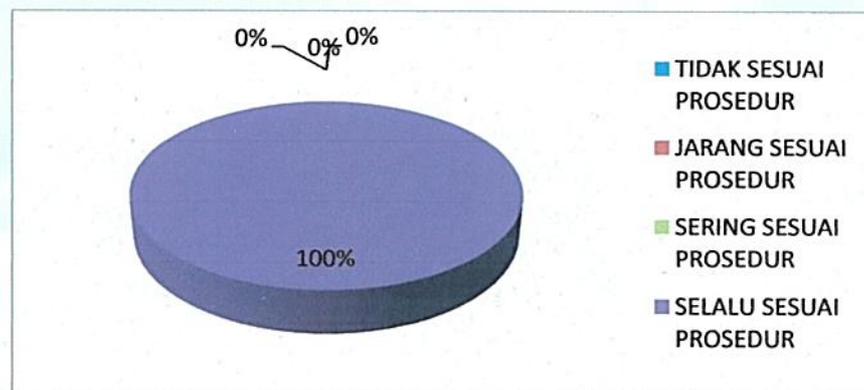
## BAB III PENGOLAHAN SURVEI

### 3.1. Analisis Hasil Survey

#### 3.1.1. Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 (**Empat Koma Nolnol**). Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo “Sangat Baik”

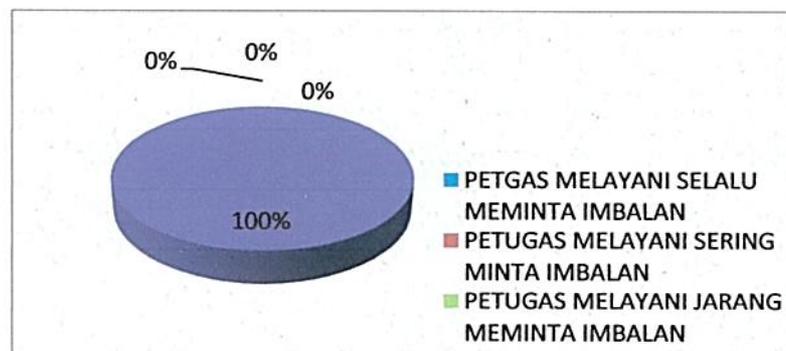
**Grafik 1**  
**Data Responden**  
**Unsur Manipulasi Peraturan**



#### 3.1.2. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 (**empat koma nol**). Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Sangat Baik.

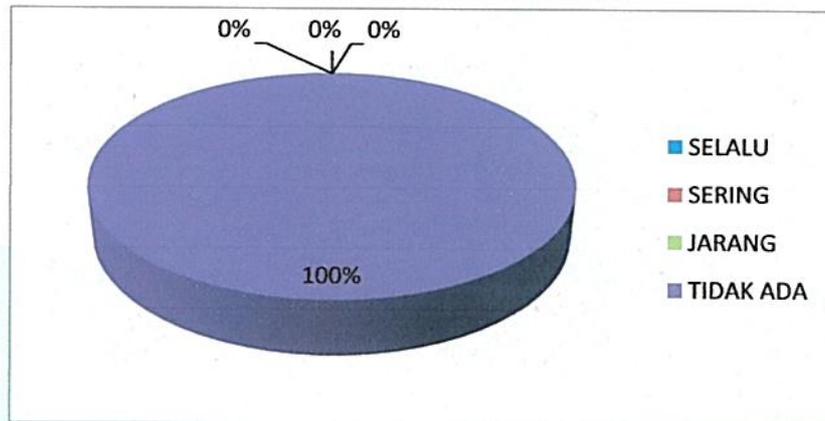
**Grafik 2**  
**Data Responden**  
**Penyalahgunaan Jabatan**



### 3.1.3. Menjual Pengaruh

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat Koma NolNol ). dan berada pada kategori “ Sangat Baik”.

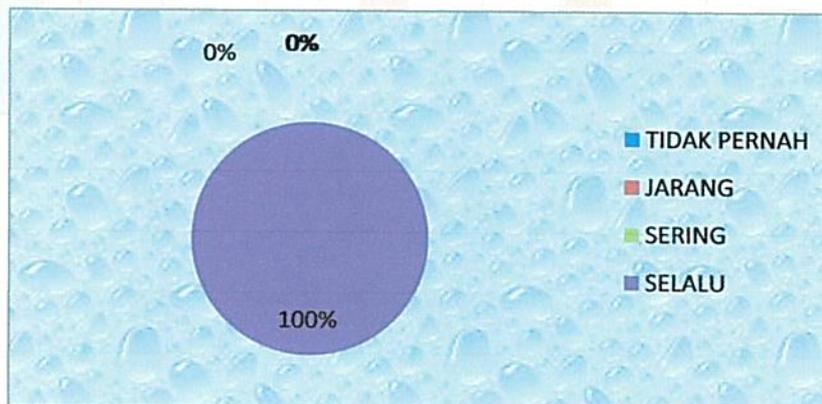
**Grafik 3**  
**Unsur Waktu Pelayanan**



### 3.1.4. Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi biaya ini menunjukkan hasil 4,00 (Empat Koma NolNol ). Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo “ Sangat Baik”.

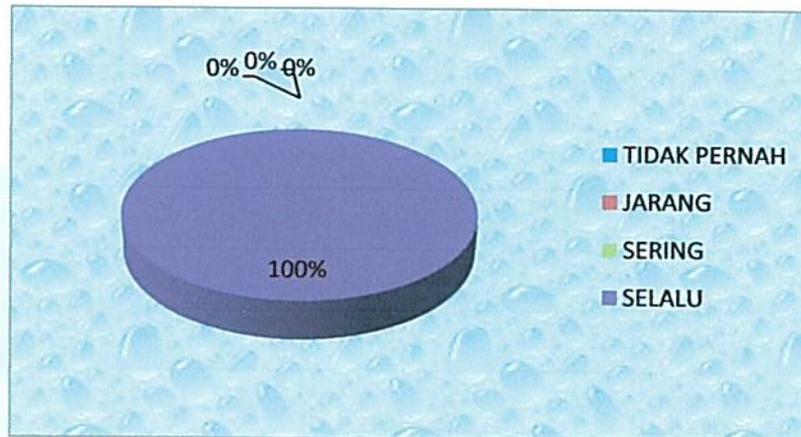
**Grafik 4**  
**Data Responden**  
**Unsur Transparansi Biaya**



### 3.1.5. Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada 4,00 (Empat Koma NolNol ). Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo “ Sangat Baik”..

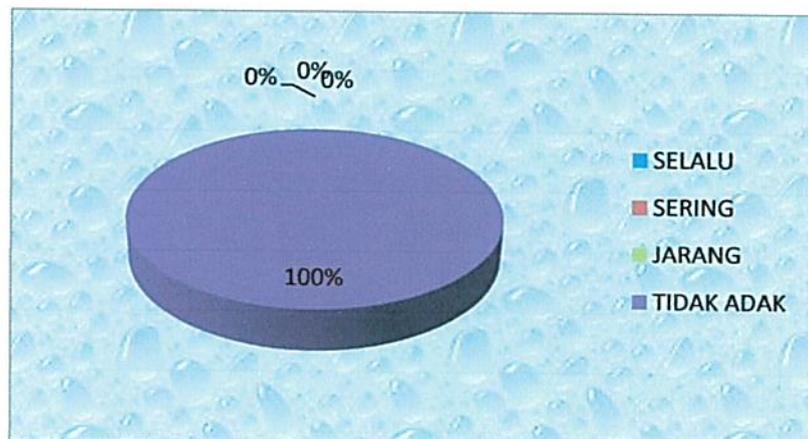
**Grafik 5**  
**Data Responden**  
**Unsur Biaya Tambahan**



### 3.1.6. Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada 4,00 (Empat Koma NolNol ). Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo “ Sangat Baik.

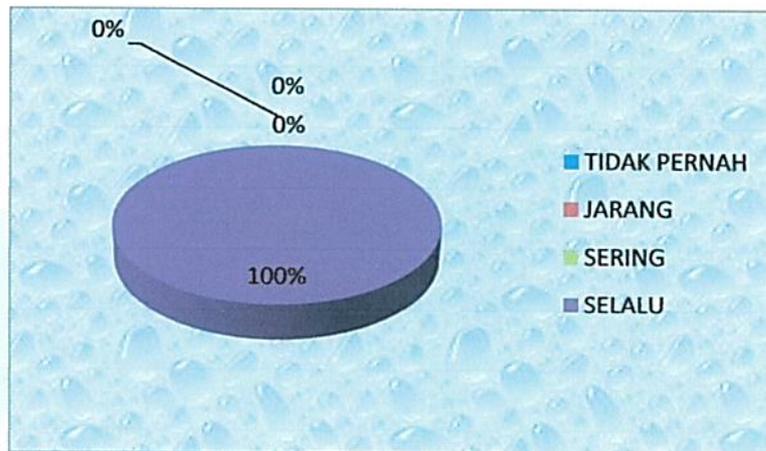
**Grafik 6**  
**Data Responden**  
**Unsur Hadiah**



### 3.1.7. Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4 hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada 4,00 (Empat Koma NolNol ). Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo “ Sangat Baik “

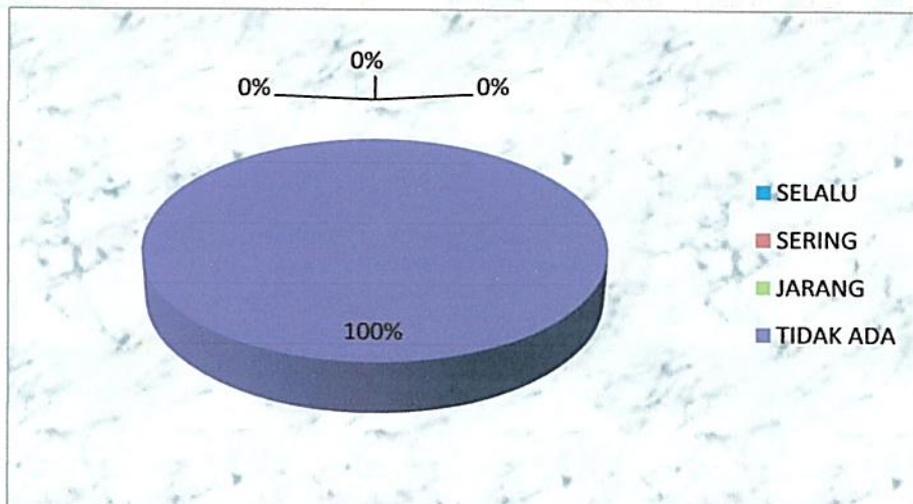
**Grafik 7**  
**Data Responden**  
**Unsur Transparansi Pembayaran**



### 3.1.8. Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada 4,00 (empat koma nol). Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo “ Sangat Baik “

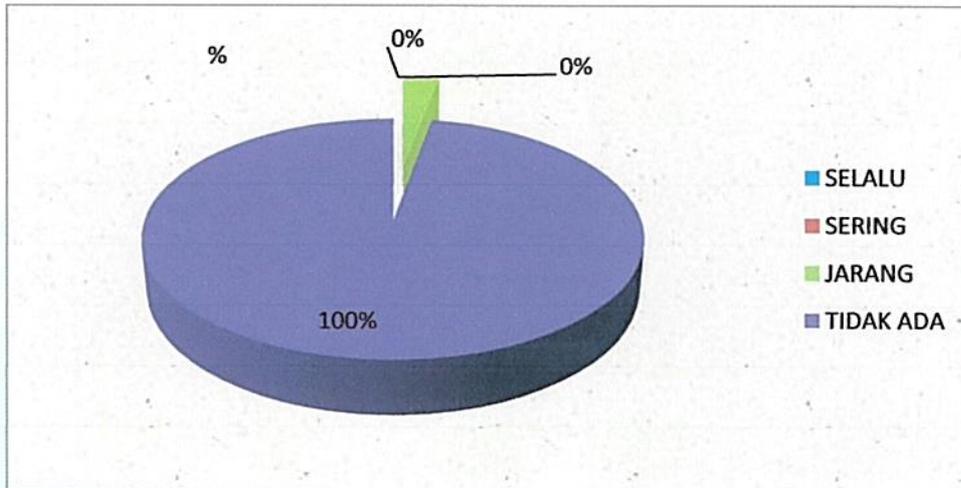
**Grafik 8**  
**Data Responden**  
**Unsur Percaloan**



### 3.1.9. Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada 4,00 (Empat Koma NolNol ). Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo “ Sangat Baik.

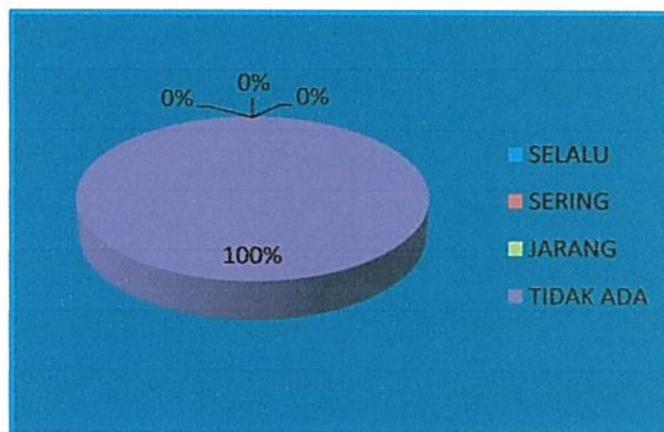
**Grafik 9**  
**Data Responden**  
**Unsur Perbuatan Curang**



### 3.1.10. Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada 4,00 (empat koma nol). Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo “ Sangat Baik

**Grafik 10**  
**Data Responden**  
**Unsur Transaksi Rahasia**



Dari Survei Persepsi Anti Korupsi 10 (sepuluh) Indikator tersebut diatas, maka diperoleh Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) satuan kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar sebesar 4,00 (Empat Koma NolNol) jika dikonversi menjadi 100 % (Seratus Persen) dan berada pada kategori “Sangat Baik”.

**Tabel 3**  
**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja**  
**Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo**

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Prosedur	4,00
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
3	Menjual Pengaruh	4,00
4	Tarib/Biaya	4,00
5	Biaya Tambahan	4,00
6	Hadiah	4,00
7	Transparansi Pembayaran	4,00
8	Percaloan	4,00
9	Perbuatan Curang	4,00
10	Transaksi Rahasia	4,00

### 3.2. Evaluasi Hasil Survey

Dari data pada table 3 diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 3 (tiga) indikator penilai survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan nilai terendah yaitu Indikator Kesesuaian Prosedur, Penyalahgunaan Jabatan serta Menjual Pengaruh.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 3 (tiga) Unsur terendah tersebut diatas maka ditemukan beberapa penyebab hasil indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan tinggi Gorontalo periode Januari sampai Maret 2025 yaitu sebagai berikut:

### **1. Prosedur yang Berlaku**

Untuk Indikator ini Petugas PTSP Telah Menjalankan Pelayanan sesuai dengan Prosedur yang berlaku tanpa membedakan suku, agama dan faktor kekerabatan terhadap pengguna layanan

### **2. Menjual Pengaruh**

Untuk Indikator ini sudah berada di kategori sangat baik, Pimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo selalu aktif dalam melakukan pembinaan terhadap seluruh Pejabat maupun Pegawai untuk Tidak Menawarkan bantuan dalam Pengurusan Surat berkas perkara, dalam hal ini pembinaan dilakukan pada saat apel Pagi dan sore serta pada rapat-rapat berjenjang dan rapat Dinas.

### **3. Perbuatan Curang**

Untuk indikator ini sudah berada di kategori sangat baik, namun Pimpinan Pengadilan Tinggi tetap selalu memberikan Pembinaan Kepada Petugas maupun Pegawai melalui Briping setiap minggu guna mengevaluasi kinerja seluruh Petugas PTSP maupun Pegawai Lainnya dilingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

### **3.3 . Tindak Lanjut Hasil Survey**

Adapun tindak lanjut Hasil terhadap hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi 3 (tiga) nilai terendah adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP memberikan Pembinaan terhadap para Petugas layanan agar senantiasa memberikan layanan sesuai dengan Prosedur yang berlaku tanpa memandang suku, agama, maupun Faktor kekerabatan/kekeluargaan antara Petugas layanan dengan Pengguna Layanan.
2. Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP meningkatkan Pengawasan terhadap penerapan Nomor antrian layanan sesuai dengan nomor antrian kedatangan sesuai dengan nomor antrian yang telah disediakan di ruang PTSP sehingga Penerima layanan tidak merasa di curangi dalam menerima layanan.
3. Pimpinan dan Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP selalu memberikan arahan melalui Briping atau pun rapat dinas guna mengingatkan kepada petugas pemberi layanan untuk menjunjung tinggi nilai integritas dalam memberi layanan serta menolak setiap pemberian imbalan dalam bentuk apapun dalam pemberian layanan kepada penerima layanan.

**BAB IV**  
**DATA SURVEI**

**4.1. Data Responden**

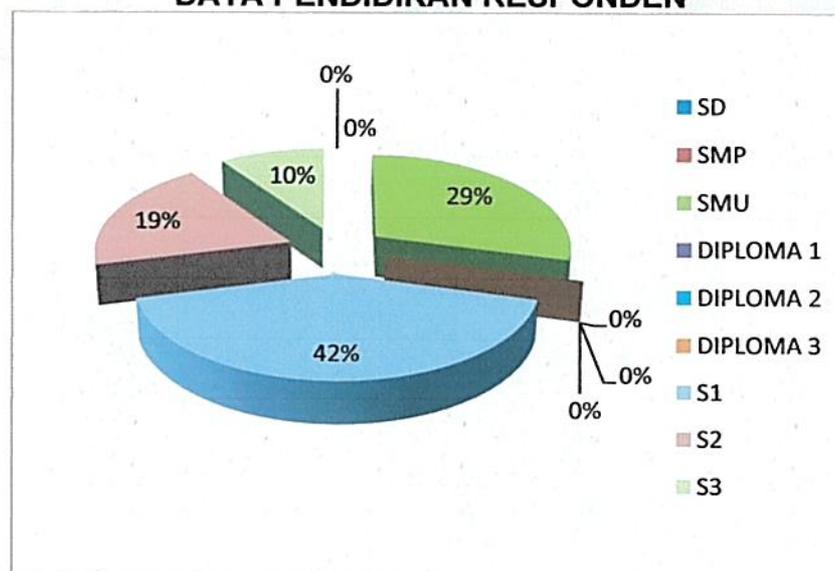
**4.1.1. Tingkat Pendidikan Responden**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pendidikan terakhir dibawah, mayoritas adalah S1 dengan jumlah 13 responden.

**Tabel 4**  
**RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN**

PENDIDIKAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMU	9	29%
DIPLOMA 1	0	0%
DIPLOMA 2	0	0%
DIPLOMA 3	0	0%
S1	13	42%
S2	6	19%
S3	3	10%
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

**GRAFIK 11**  
**DATA PENDIDIKAN RESPONDEN**



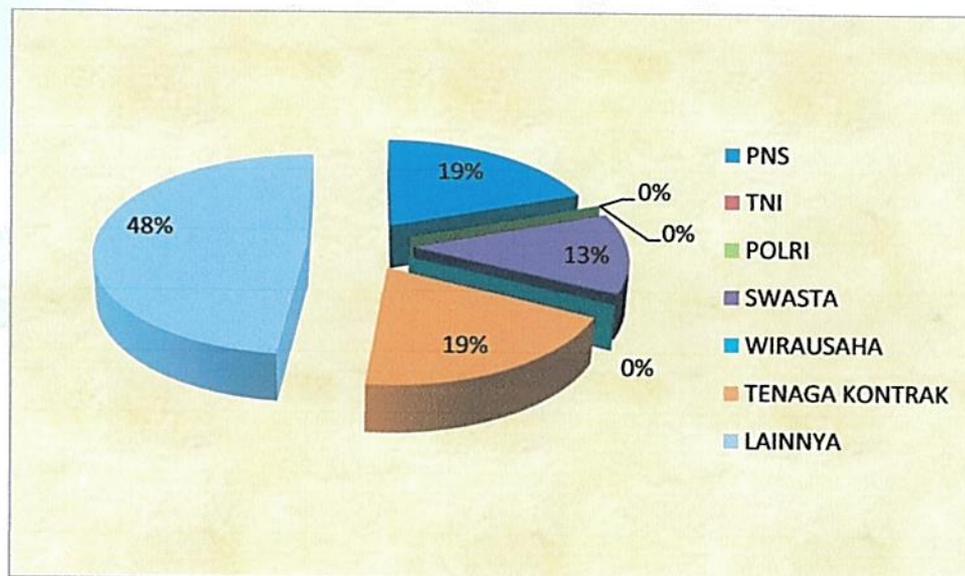
#### 4.1.2. Pekerjaan Utama Responden

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pekerjaan Utama dibawah, mayoritas adalah Lainnya dengan jumlah 15 responden.

**Tabel 5**  
**RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN UTAMA**

PEKERJAAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
PNS	6	19%
TNI	0	0%
POLRI	0	0%
SWASTA	4	13%
WIRAUSAHA	0	0%
TENAGA KONTRAK	6	19%
LAINNYA	15	48%
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

**GRAFIK 12**  
**DATA PEKERJAAN UTAMA RESPONDEN**



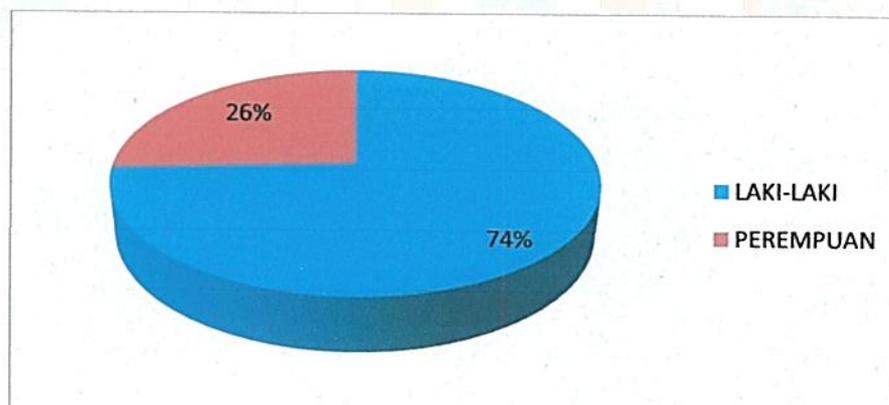
### 4.1.3. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 23 responden dan kelamin perempuan dengan jumlah 8 responden

**Tabel 6**  
**RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

JENIS KELAMIN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
LAKI-LAKI	23	74%
PEREMPUAN	8	26%
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

**GRAFIK 13**  
**DATA JENIS KELAMIN RESPONDEN**



## 4.2. Data Dukung Lainnya

### 4.2.1. Indeks Total

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN TINGGI GORONTALO NILAI INDEKS <b>4,00 / 100,00 %</b> Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025			JUMLAH	31 RESPONDEN	
			JENIS KELAMIN	LAKHLAKI : 23 ORANG PEREMPJUAN : 8 ORANG	
			PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG Diploma 2 : 0 ORG SD : 0 ORG Diploma 3 : 0 ORG SMP : 0 ORG S1 : 13 ORG SMU : 9 ORG S2 : 6 ORG Diploma 1 : 0 ORG S3 : 3 ORG	
			PEKERJAAN	PNS : 6 ORG SWASTA : 4 ORG TNI : 0 ORG WRAUSAHA : 0 ORG POLRI : 0 ORG TENAGA KONTRAK : 6 ORG LAINNYA : 15 ORG	

### 4.2.2. Data Domisili Responden

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Daerah Domisili		Jumlah ( Orang )			
1	SULAWESI TENGGARA	1			
2	GORONTALO	30			

### 4.2.3. Data Umur Responden

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Deskripsi	Jumlah ( Orang )		% ( Persen )		
18 - 28 Th	6		19,35		
29 - 39 Th	16		51,61		
40 - 49 Th	3		9,68		
50 - 59 Th	4		12,90		
60 - 69 Th	2		6,45		
Total	31				

### 4.2.4. Data Layanan

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Layanan		Jumlah ( Orang )			
1	Layanan Hukum / Informasi	7			
2	Layanan Administrasi Umum	24			

## 4.2.5. Nilai Per Unsur

Indeks Total	Data Umum Responden		Data Domisili Responden		Data Umur Responden		Data Layanan		Nilai Per Unsur		
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
NRR Per-RL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
NRR Terimbang	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	4.000
IPAK Und Pelayanan											4,00

## 4.2.6. Tiga Unsur Terendah

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	124
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dan petugas untuk meminta imbalan tertentu?	124
3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?	124

## 4.2.7. Tiga Unsur Tertinggi

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	124
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dan petugas untuk meminta imbalan tertentu?	124
3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?	124

## 4.2.8. Data Umum Responden

1	Rusli Utira R:064539-IPAK-97D488E89A No. HP 82348795309	GORONTALO	36 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Anonim R:064539-IPAK-19F5656037 No. HP 81354568800	GORONTALO	34 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Andi Adlin Rahman R:064539-IPAK-3D81891211 No. HP 82344565531	GORONTALO	38 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Hamid Hanggan R:064539-IPAK-41FFC4D65C No. HP 82191549239	GORONTALO	29 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Kristina Towalu, S Pd, M Pd R:064539-IPAK-08B4D4D8FD No. HP 85394007457	GORONTALO	38 Tahun Perempuan	S2 PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Rahmat R. Markar R:064539-IPAK-1E32E2E4B5 No. HP 085145021188	GORONTALO	29 Tahun Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Hasrul Amtung R:064539-IPAK-B3020551AA No. HP 085240906339	GORONTALO	34 Tahun Laki-laki	S1 TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	ALDI PUTERA KAHARU R:064539-IPAK-031C7D8EE3 No. HP 82340028753	GORONTALO	20 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Herisa R:064539-IPAK-87889DE879 No. HP 085342729932	GORONTALO	38 Tahun Laki-laki	S2 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Abdul Gaffar L A Tjokke R:064539-IPAK-8E974E4388 No. HP 0812128538838	GORONTALO	82 Tahun Laki-laki	S3 PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Abdu Gaffar L A Tjokke R:064539-IPAK-08E974E4388 No. HP 0812128538838	GORONTALO	82 Tahun Laki-laki	S3 PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Januari 2025
12	ANDI SUGHAB R:064539-IPAK-2048772789 No. HP 08167086570	GORONTALO	44 Tahun Laki-laki	S3 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Januari 2025
13	ELEN WANEY R:064539-IPAK-0CE5E5199C No. HP 85240408588	GORONTALO	51 Tahun Perempuan	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
14	Zhohn Busura R:064539-IPAK-DC142E5344 No. HP 81368087938	GORONTALO	28 Tahun Laki-laki	S1 SIWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
15	Muchlis J Mokodongan R:064539-IPAK-82CE4E5960 No. HP 8628288811	GORONTALO	52 Tahun Laki-laki	S2 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
16	Juhi R:064539-IPAK-72CED91587 No. HP 812833815	GORONTALO	33 Tahun Laki-laki	S2 SIWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
17	Dewi Ramli Usman R:064539-IPAK-8188C300FF No. HP 81244955807	GORONTALO	28 Tahun Perempuan	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
18	Amisha Windi Lestari R:064539-IPAK-A8C7BA358A No. HP 81225934555	GORONTALO	33 Tahun Perempuan	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
19	Abby Mokodongan R:064539-IPAK-BBD18D96A3 No. HP 81310234234	GORONTALO	40 Tahun Perempuan	S2 SIWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
20	Mamad Dama R:064539-IPAK-415DEB20CC No. HP 86288034913	GORONTALO	38 Tahun Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 Januari 2025

21	Sefiyant Banoan R-064510-IPAK-0B2A2CF05E3 No HP 82260444982	GORONTALO	35 Tahun Perempuan	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Januari 2025
22	Anaha Widi Lestari R-064510-IPAK-4D320553AB7 No HP 81230934550	GORONTALO	33 Tahun Perempuan	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Januari 2025
23	Atusan R-064510-IPAK-6D26E8309C8 No HP 081342170560	GORONTALO	54 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Januari 2025
24	Herman Zaes R-064510-IPAK-1D7802E8FD No HP 082347303456	GORONTALO	35 Tahun Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Januari 2025
25	RHEVALD ANBAR PUTRA NURDI R-064510-IPAK-24080C309D No HP 082117418220	GORONTALO	21 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Januari 2025
26	Rahmat Coto R-064510-IPAK-3E24B34C66 No HP 082164704855	GORONTALO	40 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2025
27	Yanandani Anam R-064510-IPAK-15F8F363E7 No HP 08637982864	SULAWESI TENGARA	33 Tahun Perempuan	SMU SIYASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2025
28	Arman Bobhoe R-064510-IPAK-8D0C7AC22D No HP 81244100090	GORONTALO	51 Tahun Laki-laki	S2 LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2025
29	Ruli Utra R-064510-IPAK-873EAB9F29 No HP 082343795309	GORONTALO	35 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2025
30	Muhammad Vikram R-064510-IPAK-48D0429925 No HP 082160066153	GORONTALO	24 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2025

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisil Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Umur											Waktu Rekam
Show 31 entries Copy CSV Excel PDF Print Search																
	Nama/Kode Responden	Domisil	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam	
31	Raines Vadi R-064510-IPAK-BEE2DF83C7 No HP 086602746340	GORONTALO	28 Tahun Laki-laki	S1 PHS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2025	

Showing 31 to 31 of 31 entries

Previous 1 2 3 4

**LAPORAN MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)  
DI PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PERIODE JANUARI - MARET 2025**

---

---

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini meliputi:

1. Evaluasi hasil Survei
2. Nilai Terendah dan Tertinggi

**C. Maksud dan Tujuan**

Tujuan dilakukannya Tindak Lanjut monitoring dan evaluasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kepuasan atas kebijakan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Gorontalo.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peningkatan layanan dalam rangka mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku.
2. Adanya tindaklanjut Monitoring dan evaluasi terkait Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo.

## D. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tabel 1  
Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Prosedur	4,00
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
U3	Menjual Pengaruh	4,00
U4	Informasi Tarif Biaya	4,00
U5	Biaya Tambahan	4,00
U6	Hadiah	4,00
U7	Transparansi Pembayaran	4,00
U8	Percaloan	4,00
U9	Perbuatan Curang	4,00
U10	Transaksi Rahasia	4,00

1. Dari hasil survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Gorontalo memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4,00 (empat Koma Nol) jika dikonversi menjadi 100 % (Seratus Persen) dan masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.
2. Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk periodik Januari – Maret 2025 tersebut di atas, menunjukkan tiga indikator Terendah,  
**Terendah**
  1. Prosedur Yang berlaku
  2. Penyalahgunaan Jabatan
  - 3 Menjual Pengaruh
3. Hasil survei untuk mengukur indeks persepsi anti korupsi yang dapat dijadikan dasar dan bahan melakukan evaluasi kinerja oleh semua pegawai Pengadilan Tinggi Gorontalo.
4. Hasil survei dapat bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan masyarakat pencari keadilan.

3. Kesesuaian Persyaratan ;

Untuk indikator ini sudah berada pada kategori sangat baik, setiap persyaratan Pelayanan yang ada pada Layanan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah disesuaikan, dengan Standar Operasional Pelayanan yang ada ;

Demikianlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan koreksi dan masukan terhadap perbaikan pelaksanaan Kinerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Gorontalo, 27 Maret 2025  
Ketua Tim Survei



**MASDIN DALIUWA,SH.**